

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah 66 Tahun Kemerdekaan Indonesia, tingkat kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, dan perekonomian) perempuan Indonesia masih rendah. Hal ini ditandai rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan Indonesia, termarginalisasinya sebagian perempuan, banyaknya jumlah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya akses perempuan terhadap faktor – faktor produktif, tingginya angka kematian ibu (AKI), rendahnya akses perempuan terhadap pelayanan publik yang adil dan berkualitas dan berbagai permasalahan lainnya.

Walaupun belum ada angka yang pasti tentang tindak kekerasan terhadap perempuan namun data kongkrit mengenai informasi dari berbagai media mengungkapkan bahwa jumlah perempuan yang mengalami tindak kekerasan semakin meningkat, dari 165 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tahun 2002, 74% perempuan korban KDRT menderita gangguan jiwa berupa kecemasan, perasaan rendah diri, fobia dan defresi; 22 % mengalami gangguan kesakitan fisik nonreproduksi termasuk cedera, gangguan fungsional, keluhan sakit dan cacat permanen; dan 4% mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan abortus. (tn, 2009 : 159).

Untuk Kabupaten Jeneponto kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 18 kasus pada tahun 2010 dengan permasalahan

sebagian besar kekerasan suami terhadap istri berupa pemukulan sebagai akibat cemburu, selingkuh dan lainnya, adapun penyelesaian secara damai sebanyak 13 kasus dan diserahkan ke jaksa penuntut umum sebanyak 2 kasus, serta 3 laporan tidak memenuhi panggilan. (sumber; Polres Jeneponto).

Pada dasarnya kekerasan yang dialami perempuan adalah akibat adanya relasi gender yang tidak seimbang, tidak adil dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya bias budaya patriarki dalam memaknai relasi gender, disini aspek budaya yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender terjadi terlihat bahwa budaya patriarki yang meletakkan laki-laki dianggap sebagai makhluk superior dan perempuan dianggap sebagai makhluk inferior.

Berbagai masalah yang dihadapi perempuan antara lain Hak Azasi manusia (HAM) seperti masalah penindasan dan eksploitasi tindak kekerasan, pornography, perkosaan dan pelecehan seksual lainnya, perdagangan perempuan, pelacuran paksa yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran, dan keterkaitan gender dan kemiskinan akibat konstruksi peran gender laki – laki dan perempuan di tiga ranah (produksi, reproduksi dan komunitas), perempuan menjadi pihak yang dipinggirkan. Dimana saja, perempuan sebagai kelompok menikmati lebih sedikit keuntungan dalam gerak pembangunan global. Padahal perempuan bekerja dalam waktu yang lebih panjang dibandingkan laki – laki. Berikut data statistik PBB yang menggambarkan keterpinggiran perempuan secara global ; Perempuan melakukan kegiatan yang menyumbang 67 % waktu kerja dunia, Perempuan

berpendapatan 10 % dari pendapatan dunia, Perempuan merupakan 2/3 penderita buta huruf dunia, dan Perempuan memiliki kurang dari 1 % kekayaan (property) dunia. (Sundari dkk, 2008 : 43).

Akibat dari pandangan yang bias gender tersebut, dimana penempatan kerja perempuan diarena publik dalam kategori "pendapatan tambahan" sementara laki-laki dianggap sebagai penanggungjawab utama, hal ini aspek ekonomi terjadi dimana dalam keluarga berpenghasilan rendah, pekerjaan perempuan tidak hanya melakukan pekerjaan reproduktif (perawatan anak, pemeliharaan rumah tangga, menyediakan makanan, mencari kayu bakar, merawat rumah, dan kesehatan keluarga), tetapi juga melakukan pekerjaan produktif, yang sering dianggap menjadi sumber penghasilan kedua dalam rumah tangga. Selain itu perempuan juga aktif terlibat dalam kegiatan komunitas yang biasanya tidak dibayar dan dilakukan secara sukarela oleh perempuan dan seringkali muncul sebagai kelanjutan dari pekerjaan rumah dan melibatkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan konsumsi kolektif.

Di Kabupaten Jeneponto data tahun 2007 – 2009 tingkat partisipasi sekolah untuk tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SLTP, jumlah Perempuan lebih banyak, akan tetapi pada tingkat SLTA, jumlah laki – laki ternyata lebih unggul. Hal ini mengidentifikasikan pada sekolah yang lebih tinggi perempuan masih belum bisa bersaing dengan laki – laki. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 berikut :

Tabel 1

Jumlah Murid Sekolah Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, SMU sederajat
Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 – 2009

No	Kabupaten Jeneponto	Murid TK		Murid SD		Murid SLTP		Murid SMU	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	2009	2.664	2.765	27.543	27.529	3.086	3.087	5.940	5.724
2.	2008	2.226	2.264	26.695	26.523	2.292	2.814	2.556	2.329
3.	2007	1.982	2.189	24.049	23.010	2.525	2.564	2.080	1.935

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, 2009.

Dan apabila dilihat dari angka buta huruf usia 10 s/d 44 tahun, tercatat sebesar 210,315 jiwa yang tidak bisa baca aksara latin, dan dari angka tersebut yang paling banyak buta huruf adalah kaum perempuan. Hal ini dilihat dari Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 tahun keatas sebanyak 26 % dari 9.755 jumlah anak perempuan usia > 15 Tahun yang melek huruf dibagi 37.510 jumlah anak perempuan usia > 15 tahun.

Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan terjadinya perempuan yang rawan sosial dalam pendidikan, aspek sosial terjadi terhadap perempuan ditunjukkan dengan perbedaan angka partisipasi sekolah dimana perempuan lebih sedikit memperoleh kesempatan pendidikan formal maupun non formal sebagai akibat budaya patriarki yang masih kuat dimana laki-laki diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan dibandingkan dengan perempuan. Akibatnya perempuan dapat terpinggirkan dengan kualitas pendidikan yang rendah yang dimilikinya sehingga perempuan tidak bisa bersaing dengan laki-laki. Hal tersebut belum sesuai dengan target

pencapaian tujuan ketiga MDGs dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah menghilangkan kesenjangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan.

Kesenjangan gender yang lainnya dalam bidang kesehatan yang dapat mengukur kondisi sosial ekonomi penduduk yaitu Angka kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih cukup tinggi yaitu 307/100.000 kelahiran. Tingginya AKI, antara lain karena ibu hamil (bumil) terlambat memperoleh pertolongan persalinan, dan terlambat memutuskan untuk segera mencari pertolongan. Disini aspek sosial terjadi dalam hal pengambilan keputusan yang masih mempertahankan budaya patriarki, menunggu keputusan laki-laki atau keluarga untuk memutuskan apa yang akan dilakukan untuk menolong bumil tersebut, padahal seorang bumil harus secepatnya mendapat pertolongan agar tidak terjadi kematian, dan dalam hal ini penolong persalinan pada bumil dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Dengan melihat kondisi diatas, kebanyakan penolong persalinan terutama di desa dengan bantuan dukun bayi dikarenakan faktor ekonomi dan kepercayaan : Dari sudut ekonomi pembayaran persalinan kepada dukun lebih murah dan bahkan dapat ditunda, menunggu hasil panen; Dari sudut kepercayaan, ditolong dukun bayi lebih aman dan nyaman dengan adanya *bacaan atau doa-doa* yang selalu dilakukan oleh hampir semua dukun di kampung ketika menolong persalinan. Kemudahan membayar biaya persalinan ekonomi dan kenyamanan perasaan, tidak selalu ditemukan jika persalinan ditolong oleh bidan dan apalagi oleh dokter.

Aspek sosial dalam bidang kesehatan, dilihat dari angka kematian ibu sebagai tolak ukur persalinan yang sangat sensitif dan masih minimnya laki-laki untuk menggunakan alat kontrasepsi KB, dan kesenjangan gender dalam aspek kesehatan ini sebenarnya dapat diminimalisir karena pembangunan kesehatan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara mudah, murah dan merata untuk mencapai kualitas kesehatan yang lebih baik. Selain itu, pembangunan kesehatan juga merupakan investasi modal dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam aspek politik terjadi dimana perempuan menjadi tersubordinasi (penomorduaan), hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jeneponto dari 35 orang terbagi laki-laki 31 orang dan perempuan 4 orang sekitar 11,43 %, ini menunjukkan tidak terpenuhinya 30% kuota bagi perempuan di parlemen sesuai Undang-Undang 12 Tahun 2004 tentang Pemilu.

Aspek politik terjadi juga dalam partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dimana dilihat dari jumlah total PNS se Kabupaten Jeneponto sebanyak 6442 orang terbagi laki-laki 3265 dan perempuan 3177. Dengan banyaknya jumlah PNS perempuan yang hampir mendekati jumlah laki-laki sekitar selisih 88 orang, berarti dalam menduduki jabatan dan peluang untuk sejajar dengan laki-laki sama, akan tetapi kenyataan terlihat pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto sebanyak 40 SKPD dan keterlibatan perempuan yang menduduki eselon II B sebanyak 1 orang dan laki-laki sebanyak 39 orang sekitar 2,5%, yang menduduki jabatan

eselon III A sebanyak 15 orang perempuan dari 57 jabatan yang ada di Kabupaten Jeneponto sekitar 26,3% dan untuk di tingkat desa/kelurahan dari 114 desa/kelurahan terbagi 84 desa dan 30 kelurahan, partisipasi perempuan untuk memegang jabatan sebagai kepala desa sebanyak 8 orang dari 84 peluang jabatan kepala desa sekitar 9,5%, untuk kelurahan sebanyak 1 orang dari 30 peluang jabatan lurah sekitar 3,3%. (sumber : Sub Bagian Umum & Kepeg. BKDD).

Dengan data tersebut dapat dikatakan aspek politik terjadi dimana dalam masyarakat ada anggapan perempuan emosional, tidak bisa berpikir secara rasional sehingga perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin dan ditempatkan pada posisi yang tidak penting serta perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dilain pihak sebenarnya perempuan ada yang sudah sesuai dengan pangkat dan jabatan untuk dapat mengemban suatu jabatan yang diikuti dengan peningkatan kualitas perempuan misalnya jenjang pendidikan sudah banyak perempuan melanjutkan pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2), akan tetapi keberpihakan kepada perempuan belum diperhitungkan.

Dari berbagai aspek yang melatarbelakangi capaian kualitas hidup manusia khususnya perempuan, adanya fakta kesenjangan gender yang terjadi diberbagai dimensi pembangunan yang menggambarkan gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, sehingga cukup relevan untuk dipertanyakan tentang seberapa jauh program pembangunan yang responsif gender dan mampu

memenuhi hak-hak perempuan sebagai bagian dari komitmen politik pemerintah, dengan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan saat ini.

Upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan telah cukup lama dilakukan, dan tidak ada lagi kompromi bagi praktek ketidakadilan terhadap perempuan. Sejak adanya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada Tahun 1979, maka terjadi kesepakatan bersama bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan dan inti konvensi tersebut bertujuan memperjuangkan hak – hak asasi perempuan dalam keberadaanya sebagai warga bangsa untuk memperoleh kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Namun dalam kenyataanya, perjuangan untuk mengimplementasikan CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) tidak semudah membalikan telapak tangan. Nilai – nilai sosial dan budaya yang bias gender, telah sangat melekat dan mengakar dan kemudian melahirkan berbagai macam ketidakadilan pada perempuan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (revisi dari Kepmendagri Nomor 123 Tahun 2003), Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto, dimana didalamnya terbentuk untuk pertama

kali tergabung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB & PP) yang semula Badan ini berdiri sendiri yang dikenal dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu bidang dengan nama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk menjadi salah satu bidang pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto.

Dari berbagai landasan hukum tersebut telah menempatkan perempuan Indonesia pada keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki – laki untuk berperan aktif disegala bidang kehidupan dan kegiatan pembangunan khususnya yang responsif gender.

Salah satu contoh media yang melihat keterkaitan kemiskinan, gender dan pembangunan di Indonesia berupa sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 79 Tahun 2007, di Sasano Langen Budoyo, TMII, Jakarta, meminta kalangan perempuan agar melakukan kegiatan nyata yang disertai etos kerja dan produktivitas tinggi, demi memutus mata rantai kemiskinan kaum perempuan :

” Meminta kaum perempuan meningkatkan tekad mengisi pembangunan di era kebangkitan, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi utama memajukan kehidupan bangsa”. Menurut kepala negara, untuk mencapai tujuan dan pengabdian kaum perempuan tersebut, pemerintah terus melakukan perlindungan, pemberdayaan, memajukan kaum perempuan apalagi dengan melihat sebagian besar penduduk Indonesia adalah perempuan, hal ini memberikan arti bahwa kondisi

perempuan Indonesia merupakan indikator atau cermin dari sumber daya secara keseluruhan.

Di Kabupaten Jeneponto Jumlah penduduk perempuan sebanyak 172.761 jiwa dan laki – laki 161.414 jiwa (Jeneponto dalam angka 2010). Dengan melihat jumlah perempuan yang begitu besar apabila tidak dikembangkan akan menjadi beban pembangunan, dengan melihat kondisi tersebut mengidentifikasi pemberdayaan perempuan merupakan suatu tuntutan yang harus diakomodir dan ditindaklanjuti dalam wacana kehidupan demokrasi berkeadilan.

Pembangunan yang responsif gender haruslah dapat merubah status quo hubungan gender yang merugikan perempuan menjadi hubungan gender yang merefleksikan prinsip – prinsip keselarasan, keserasian dan keseimbangan, dimana manifestasi dari kebijakan yang tertuang dalam Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah ; Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan dengan laki – laki dalam pembangunan nasional, peran gender perempuan dalam keluarga, masyarakat, dilaksanakan secara selaras dan serasi, serta Adanya pengakuan terhadap kodrat yang harus dilindungi juga harkat dan martabat perempuan yang perlu dijunjung tinggi.

Upaya pemerintah kabupaten/kota untuk lebih memberdayakan berbagai potensi daerah yang ada khususnya program pemberdayaan perempuan, biasanya dihadapkan pada banyak kendala. Kendala tersebut dapat berupa rendahnya kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan pengalaman dan biaya serta keterbatasan lainnya. Oleh karena itu kondisi

yang tidak menguntungkan ini perlu diatasi dengan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah.

Program pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Jeneponto khususnya pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan antara lain program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program pemberdayaan perempuan, dan program perlindungan anak. (sumber, DPA-SKPRD BKBPP,2011).

Untuk mencapai program pembangunan pemberdayaan perempuan yang terlaksana, maka perlu adanya program pembangunan pemberdayaan perempuan Kabupaten Jeneponto yang diarahkan pada upaya pengembangan aspek-aspek pemberdayaan perempuan. Dengan adanya keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam serta sumber daya pembiayaan pembangunan saat ini, maka upaya untuk mencapai sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan skala prioritas aspek – aspek program pembangunan pemberdayaan perempuan mana yang memberikan kontribusi terbesar.

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembangunan pemberdayaan perempuan adalah munculnya kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada lagi diskriminasi. Ketimpangan sudah tidak ada lagi jika kesetaraan dan keadilan gender sudah tercapai ketika terjadi kesamaan posisi dan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari sumberdaya yang ada dan hak – hak sebagai manusia, agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan adanya kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang *"Program Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Jeneponto"*.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, secara khusus penelitian ini membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademik maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat akademik yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengertian masalah perempuan.
2. Manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam perumusan yang responsif gender.